

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAN EFISIENSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KEBERLANJUTAN KEUANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dwi Rika Khairunisa¹, Yulia Saftiana², Rela Sari³

Universitas Sriwijaya

Email : dwirikakhairunisa02@gmail.com, yuliasaftiana@fe.unsri.ac.id,
relasari@fe.unsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Kemandirian Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah berdampak pada Keberlanjutan Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel sebanyak 17 Kabupaten/Kota berdasarkan data dari laman E-PPID Pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu e-ppid.bpk.go.id. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keberlanjutan Keuangan.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah, Keberlanjutan Keuangan

ABSTRACT

This research is research conducted with the aim of finding out how Regional Financial Independence and Regional Financial Efficiency have an impact on Financial Sustainability in Regencies/Cities in South Sumatra Province. This research is a quantitative study with a sample of 17 districts/cities based on data from the Central E-PPID page of the Republic of Indonesia Financial Audit Agency, namely e-ppid.bpk.go.id. The results of this research prove that Regional Financial Independence and Regional Financial Efficiency influence Financial Sustainability.

Keywords: Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency, Financial Sustainability

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam proses mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menilai situasi lokal, mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya, mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan, menerapkan kebijakan dan memprioritaskan proyek

yang tepat (Reddy, 2016; Satterthwaite, 2017). Peran elaborasi empiris yang dimainkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan masyarakat yang berkelanjutan, termasuk TPB, sangat membantu untuk memahami jaringan kompleks tata kelola daerah untuk pembangunan berkelanjutan (Masuda et al., 2022). Kemandirian daerah adalah

kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Penyediaan layanan yang dibiayai oleh pendapatan daerah akan meningkatkan keberlanjutan daerah, karena daerah setempat tidak hanya bergantung pada utang atau bantuan tunai dari pemerintah pusat.

Wardhani & Payamta (2020) Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan keuangan pemerintah daerah adalah kemandirian keuangan daerah. Mahmudi (2013) menyatakan efisiensi berkaitan dengan proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan, atau mengukur perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang digunakan. Menurut Ritonga et al., (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa efisiensi fiskal daerah dapat mempengaruhi situasi fiskal daerah. Menurut Syadullah (2019), pemerintah daerah di Indonesia saat ini mengalami inefisiensi yang menghambat pencapaian hasil produksi yang baik di pusat belanja daerah. Menurut Subires et al.(2019), ketika pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya keuangan eksternal dibandingkan sumber daya internal, maka mungkin terdapat risiko yang menghambat keberlanjutan fiskal. Keberlanjutan keuangan berhubungan dengan kelangsungan kondisi keuangan pemerintah di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah memerlukan penetapan tujuan yang tepat dalam mempertimbangkan faktor pendorong atau faktor dalam keberlanjutan keuangan daerah. Teori penetapan tujuan merupakan teori yang dikembangkan oleh Dr.Edwin Locke menyatakan pada tahun 1968 bahwa tujuan/gagasan/keadaan yang diinginkan tentang masa depan dapat diwujudkan melalui tindakan yang mem

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdasarkan pengolahan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017-2020 yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui arah dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten dan kota, berdasarkan data yang diperoleh dengan mengakses laman portal E-PPID pemerintah pusat di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu epid.bpk.go.id.

Definisi Operasional Variabel Keberlanjutan Keuangan

Keberlanjutan keuangan dihitung berdasarkan pendapatan yang telah disesuaikan, yaitu selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional yang telah dikurangkan dengan pos luar biasa (Bolivar et al., 2019; Wardhani & Payamta, 2020).

$$\begin{aligned} \text{Financial Sustainability} \\ &= \text{Pendapatan Operasional} \\ &\quad - \text{Beban Operasional} - \text{Pos Luar Biasa} \end{aligned}$$

Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian daerah yang diukur melalui nilai pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019).

$$\begin{aligned} \text{Ketergantungan Daerah} \\ &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah adalah perbandingan dari total belanja terhadap total pendapatan (Mahmudi, 2019).

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Keuangan Daerah} \\ &= \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Analisis deskriptif memberikan penjelasan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum atas data variabel penelitian baik variabel independen yaitu *keberlanjutan keuangan* maupun dependen yaitu *Kemandirian Keuangan Daerah* dan *Efisiensi Keuangan Daerah*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Kota/Kabupaten di Sumatera selatan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
kkd	85	7,36	3.877661	2.35	31.6
ekd	85	96.18588	12.06091	66.61	129.87
kk	85	25.36247	1.656341	20.9	27.52

Sumber: Data diolah (*Stata*) 2024

1. Variabel Keberlanjutan Keuangan kabupaten/kota di Sumatera Selatan mempunyai nilai rata-rata 25.36247. Nilai maksimum sebesar 27.52 dan nilai minimum sebesar 20.9 dengan standar deviasi sebesar 1.656341.
2. Variabel Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai nilai rata-rata sebesar 7,36, nilai maksimum sebesar 31,6, nilai minimum sebesar 2,35 dengan standar deviasi sebesar 3.877661.
3. Variabel Ketergantungan Keuangan Daerah mempunyai nilai rata-rata sebesar 96.18588. Nilai maksimum sebesar 129,87, nilai minimum sebesar 66,61, dengan standar deviasi sebesar 12,06091.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi data panel yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini

terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Menurut Basuki & Prawoto, (2016), tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linear.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolenearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka terjadi multikolenearitas. Sedangkan jika VIF di atas 10 maka tidak terjadi multikolonealiritas.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
ekd	4.47	0.223713
kkd	4.47	0.223713
Mean VIF	4.47	

Sumber: Data diolah (*Stata*) 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat variabel Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai (VIF) 4,47 dan *tolerance* > 0,223713, variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X2) memiliki nilai (VIF) 4,47 dan *tolerance* > 0,223713. Dengan

demikian dapat dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel independen pada penelitian ini bebas multikolenearitas.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedisitas. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas dan titik-titik menyebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu y dari grafik *scatterplot*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).

Tabel 3. Uji Heterokedastisitas

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Assumption: Normal error terms
Variable: Fitted values of kk

H0: Constant variance

chi2(1) = 0.55
Prob > chi2 = 0.4598

Sumber: Data diolah (*Stata*) 2024

Pengujian ini membandingkan signifikan apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian pada penelitian ini diketahui tingkat sig sebesar 0,4598 > 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Regresi Berganda

kk	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
kkd	.0928458	.0393907	2.36	0.021	.0141998	.1714918
ekd	-.0325281	.0142211	-2.29	0.025	-.0609215	-.0041347
_cons	27.80787	1.440371	19.31	0.000	24.93207	30.68366
sigma_u	1.4905402					
sigma_e	1.0906997					
rho	.65127275	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(16, 66) = 7.87

Prob > F = 0.0000

Sumber: Data diolah (*Stata*) 2024

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi data panel sebagai berikut.

$$\text{Financial Sustainability} = 27,8078 + 0,0928458 \text{ KKD} - 0,0325281 \text{ EFS}$$

Keterangan :

Kk : keberlanjutan keuangan

Kkd : kemandirian keuangan daerah

Ekd : efisiensi keuangan daerah

Persamaan regresi tersebut diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta regresi bernilai 27,8078, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Kemandirian Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah nilainya 0, maka besarnya keberlanjutan keuangan nilainya sebesar 27,8078.
2. Koefisien regresi variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,0928458 dengan nilai positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1 satuan, maka akan menambah *keberlanjutan keuangan* sebesar 0,0928458 satuan

dengan asumsi variabel independen lain nilainya konstan.

3. Koefisien regresi variabel Efisiensi Keuangan Daerah sebesar -0,0325281, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Efisiensi Keuangan Daerah sebesar 1 satuan, maka akan menambah *keberlanjutan keuangan* sebesar -0,0325281 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya konstan.

Berdasarkan pengujian, hasil hipotesis 1 dimana kemandirian keuangan daerah diperoleh nilai t-hitung sebesar $2.36 >$ nilai t-tabel sebesar 1.98932 dengan tingkat Sig. $0,021 < \alpha 0,05$ yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dapat memberikan tingkat pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wardhani & Payamta, (2020), (Lhutfi & Sugiharti, 2022) dan Brusca *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil hipotesis 2 diperoleh nilai t-hitung sebesar $-2.29 >$ nilai t-tabel sebesar 1.98932 dengan tingkat Sig. $0,025 < \alpha 0,05$ yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Ritonga dkk, (2019) yang menyatakan bahwa efisiensi keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan belanja yang tinggi mempunyai

kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Keberlanjutan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa variabel Kemandirian Keuangan Daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dapat memberikan tingkat pelayanan secara berkelanjutan dan Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan belanja yang tinggi mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah yang telah ditentukan, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yaitu penelitian ini hanya dilakukan di kabupaten/kota Sumatera Selatan sehingga penelitian ini hanya membahas pemerintahan di daerah tersebut. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah dan Efisiensi Keuangan Daerah, sehingga masih ada faktor lain yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, peneliti memberikan beberapa saran agar kedepannya mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu penelitian selanjutnya bisa memperluas lingkup penelitian tidak hanya pada kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan namun diperluas daerahnya. Peneliti selanjutnya bisa menambahkan atau mengganti variabel lain yang tidak peneliti bahas

pada penelitian ini agar bisa mengetahui faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi keberlanjutan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017-2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017-2021.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*. PT Raja Grafindo.
- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2015). Drivers for the financial condition of local government: A comparative study between Italy and Spain. *Lex Localis*, 13(2), 161–184.
<https://doi.org/10.4335/13.2.161-184>(2015)
- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jin, T., & Zhang, J. (2011). Effect of local government expenditure on the ratio of output to capital: Evidence from panel data at China's provincial level. *Frontiers of Economics in China*, Springer, Higher Education Press, 6(2).
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(5), 2592–2620.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.4843>
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2022). Financial Sustainability of Local Governments in Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159–170.
<https://doi.org/10.17509/jurnal>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Masuda, H., Kawakubo, S., Okitasari, M., & Morita, K. (2022). Exploring the role of local governments as intermediaries to facilitate partnerships for the Sustainable Development Goals. *Elsevier*, 82.
<https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103883>
- Reddy, P. S. (2016). Localising the sustainable development goals (SDGs) The role of Local Government in context. *African Journal of Public Affairs*, 9(2), 1–15. www.worldwewant2015.org/
- Ritonga, I. T. (2014). Developing a measure of local government's financial condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2).
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickreimasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2).
<https://doi.org/10.18196/jai.200214>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galeira, A., Alcaide Muñoz, L., & López Suibirés, M. D. (2014). Factors influencing local government financial sustainability: An empirical study. *Lex Localis*, 12(1).
<https://doi.org/10.4335/12.1.31-54>(2014)
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galeira, A., López Suibirés, M. D., & Alcaide Muñoz, L. (2018). Analysing the accounting measure of financial

- sustainability in local governments through political factors. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(8).
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2016-2754>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suibireis, M. D. L., Muiñoz, L. A., Galeira, A. N., & Bolívar, M. P. R. (2019). The influence of sociodemographic factors on financial sustainability of public services: A comparative analysis in regional governments and local governments. *Sustainability* (Switzerland), 11(21).
<https://doi.org/10.3390/sui11216008>
- Syaduillah, M. (2019). *Pengeiluan keamanan siber sektor perbankan Asean*. Keimeinkeui.go.id.
https://portal.fiskal.keimeinkeui.go.id/pustaka/index.php?p=show_detail&id=3855&keywords=
- Tri Wardhani, D., & Payamta. (2020). Menguji faktor determinan financial sustainability pada sektor pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13–27.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>